

**A STUDY OF THE ACT OF UNLAWFUL CONTROL OF AN AIRPLANE IN
CIVIL AVIATION BASED ON AIR LAW**

(Case Study on Ethiopian Airlines Flights 702 in 2014)

By:

GILANG KHALIFA AKBAR

E1B020044

ABSTRACT

Aircraft hijacking in the modern era is a threat to the security and safety of civil aviation, the international convention on unlawful acts in aircraft authorizes flight crews to take certain steps in the event of aircraft hijacking. The problem arises when the crew itself is the perpetrator of the hijacking, as in the case of Ethiopian Airlines Flights 702 in 2014 who hijacked the airplane he was driving because the perpetrator felt threatened with life in his own country.

This research aims to find out how the legal arrangements regarding unlawful control against civil aircraft and to analyze their implementation of the Ethiopian Airlines Flight 702 case. This research uses statute and case approaches. The approach is carried out by examining secondary data as basic material to be researched by means of literature study of legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained is then presented in the form of narrative text and analyzed using qualitative normative methods.

Based on the results of research and discussion, the regulation of unlawful acts against civil aircraft is regulated in the 1963 Tokyo Convention, 1970 Hague Convention, 1971 Montreal Convention, 2010 Beijing Convention, and 2014 Montreal Protocol which appear based of standar and recommendation in SARPs Chicago Convention 1944. In the case of Ethiopian Airlines Flights 702, the implementation of regulatory provisions regarding unlawful acts against civil aircraft can be applied to the Tokyo Convention 1963 and the Hague Convention 1970 because it fulfills the elements contained in the convention. Extradition is regulated in Article 8 of the Hague Convention which implies that the 1970 Hague Convention can be used as a basis for extradition, but in this case the perpetrator was not extradited but was sentenced by the Swiss Federal Court to undergo mental health treatment and pay a fine of CHF 3,000 and revocation of the pilot's license.

Keywords: *aircraft hijacking, jurisdiction, air law*

**KAJIAN TENTANG TINDAKAN PENGUASAAN PESAWAT UDARA
SECARA MELAWAN HUKUM DALAM PENERBANGAN SIPIL
INTERNASIONAL MENURUT HUKUM UDARA
(Studi Kasus Ethiopian Airlines Flight 702 in 2014)**

**Oleh:
GILANG KHALIFA AKBAR
E1B020044**

ABSTRAK

Pembajakan pesawat udara di era modern menjadi ancaman bagi keamanan dan keselamatan penerbangan udara sipil, konvensi internasional mengenai tindakan melawan hukum dalam pesawat udara memberikan suatu wewenang kepada awak penerbang pesawat untuk mengambil langkah tertentu jika terjadi pembajakan pesawat udara. Masalah timbul ketika awak pesawat itu sendiri yang menjadi pelaku pembajakan tersebut, seperti dalam kasus Ethiopian Airlines Flights 702 pada 2014 yang membajak pesawat udara yang dikemudikannya karena pelaku merasa terancam hidup di negaranya sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai tindakan penguasaan secara melawan hukum terhadap pesawat udara sipil dan menganalisis implementasinya terhadap kasus Ethiopian Airlines Flight 702. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum pesawat udara sipil diatur dalam Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Montreal 1971, Konvensi Beijing 2010, dan Protokol Montreal 2014 yang didasari oleh standar and rekomendasi atau SARPs di Konvensi Chicago 1944. Dalam kasus Ethiopian Airlines Flights 702, implementasi ketentuan pengaturan mengenai tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara sipil dapat diterapkan Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Den Haag 1970 karena memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam konvensi. Ekstradisi diatur dalam Pasal 8 Konvensi Den Haag yang mengisyaratkan bahwa Konvensi Den Haag 1970 dapat dijadikan dasar ekstradisi, namun dalam kasus ini pelaku tidak diekstradisi melainkan divonis oleh Pengadilan Federal Swiss untuk menjalani perawatan kesehatan mental serta membayar denda sebesar CHF 3.000 dan pencabutan lisensi pilot.

Kata Kunci: *pembajakan pesawat udara, yurisdiksi, hukum udara*